

Surat Terbuka II Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

**Yth. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara
JAKARTA**

Sampai hari ini keadilan dan kebenaran belum kami rasakan sebagai rakyat yang telah menjadi korban pelanggaran HAM di negeri ini. Hari ini kembali kita diingatkan tentang peristiwa 27 Juli 2007; sebuah skenario politik yang sengaja diciptakan dengan menggunakan kekuatan politik negara. Ratusan masyarakat sipil tak berdosa menjadi korban pada peristiwa tersebut.

Namun sampai hari ini Tak ada kebenaran yang terungkap dan keadilan yang terasa. Pengadilan koneksitas yang digelar, justru membebaskan orang-orang yang diduga pelaku lapangan. Dan sama sekali tidak menyeret otak dari peristiwa tersebut. Peristiwa 27 Juli hanya satu contoh dari sekian pelanggaran HAM di negeri ini yang tak jua memberi keadilan dan kebenaran bagi korban dan keluarga korban. Tragedi Kemanusiaan 1965/1966, Tragedi Talang Sari Lampung, Kasus Penculikan Aktivis 1998, Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Kasus Tanjung Priok, Kasus Kerusuhan Mei 1998, Pembunuhan Munir dan Kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, terus menggunung tanpa ada penyelesaian yang memberi keberpihakan kepada korban.

Untuk itu di aksi kamisan ke 27, melalui surat ini kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menuntut kepada Presiden:

1. Tuntaskan segala kasus pelanggaran HAM (Tragedi Kemanusiaan 1965/1966, Kasus Tanjung Priok 1984, Tragedi Talangsari Lampung 1989, Kasus Penculikan Aktivis 1998, Kasus Trisakti 1998, peristiwa Mei 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Pembunuhan Munir 2004)
2. Tolak Impunitas; kekebalan hukum dan pengampunan terhadap para pelaku pelanggaran HAM
3. Penuhi hak-hak Kebenaran korban; Hak atas kebenaran, Hak untuk mengetahui, Hak Atas Refarasi; Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi

Demikian Tuntutan ini kami sampaikan untuk segera diputuskan Bapak Presiden. Dan kami akan tetap menyuarakan tuntutan kami sampai Negara ini memenuhi hak-hak kami sebagai korban.

Korban dan Kelaurga Korban Pelanggaran HAM
Kamis, 26 Juli 2007